



---

**KINERJA SISTEM INFORMASI (STUDI DI DESA SEMUGIH KECAMATAN  
RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**

Oleh

Evi Nilawati<sup>1</sup>, Sri Suhartanta<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gunung Kidul

Jl. Ringroad Utara Selang Wonosari Gunungkidul

<sup>2</sup>BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul

Jl. Satria No.3 Wonosari Gunungkidul

E-mail: <sup>1</sup>[alfitra\\_n@yahoo.co.id](mailto:alfitra_n@yahoo.co.id), <sup>2</sup>[sri\\_hartanta@yahoo.co.id](mailto:sri_hartanta@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Manajemen publik baru (new public management) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menuntut pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi desa (village information system). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem informasi di Desa Semugih Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi kebijakan (policy evaluation). Informan ditentukan dengan sampel bertujuan, terdiri dari: operator desa, pamong/perangkat kalurahan, forum pengembang sistem informasi, aparat kecamatan, dan pendamping sistem informasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja sistem informasi di Semugih cukup memadai. Kinerja (performance) sistem informasi meliputi kinerja hasil awal (initial outcomes) dan kinerja hasil antara (intermediate outcomes). Kinerja hasil awal meliputi: pencapaian tujuan (goal attainment) yang terdiri dari pelayanan publik, pemutakhiran data kemiskinan, dan jurnalisme warga; kesesuaian strategis (strategic constituencies) sistem informasi dengan kebutuhan; dan nilai keunggulan (competing values). Kinerja hasil antara yaitu peningkatan partisipasi dan transparansi pemerintahan dan pembangunan desa. Peneliti selanjutnya disarankan agar meneliti kinerja jangka panjang (long terms outcomes) sistem informasi.

**Kata Kunci: Kinerja, Sistem Informasi, Partisipasi, Transparansi**

**PENDAHULUAN**

Sistem informasi penting dalam pengelolaan pemerintahan di era otonomi desa. Sistem informasi untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 agar desa mengembangkan sistem informasi. Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA). Sistem informasi ini pertama kali dikenalkan oleh IDEA dan *Combine Resource Institution (CRI)* pada tahun 2012, dan selanjutnya

dikembangkan CRI bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuatif berturut-turut pada tahun 2015-2020 sebesar 21,73%, 19,34%, 18,65%, 17,12%, 16,61%, dan 17,07%. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anggara selaku Tim Pembina sistem informasi desa tingkat kabupaten, menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya *inclusion error* yaitu warga tidak miskin yang masuk data kelompok miskin. Demikian juga sebaliknya, terjadi *exclusion error* yaitu warga seharusnya masuk data warga miskin tetapi tidak terdata pada data warga miskin. Oleh karena itu sistem informasi diimplementasikan



untuk tujuan *updating* data warga miskin. Sistem informasi untuk menjamin ketepatan data dalam rangka program penanggulangan kemiskinan. Sistem informasi manajemen mempengaruhi ketepatan dan keakuratan pengambilan keputusan[1].

Sistem informasi desa menjadi bagian program *smart city* Kabupaten Gunungkidul. Kerangka kerja sosial, manajemen, ekonomi, legal, teknologi, dan keberlanjutan menjadi landasan pengembangan *Smart Cities*[2]. *Smart cities* untuk mewujudkan perubahan pada nilai-nilai *cities smart*[3]. Pengalaman *smart cities* di China terdapat kinerja berbeda-beda pada aspek infrastruktur, manusia, kota, ekonomi, dan lingkungan[4].

Kajian sistem informasi berhubungan dengan perspektif teori Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System - MIS*). MIS untuk mewujudkan keberhasilan tujuan organisasi publik[5]. Manajemen kinerja (*performance management*) organisasi publik tingkat pusat sampai desa berorientasi pada pengukuran hasil (*outcomes*) dan bukan sekedar input[6]. Bentuk reformasi birokrasi manajemen publik baru (*new public management*) Osborn dan Gaebler yaitu pemerintahan membiayai hasil (*results-oriented government*). Hasil yang didapatkan apakah telah sesuai terhadap tuntutan pihak yang membutuhkan (*result-oriented criteria*)[5].

Penelitian sebelumnya tentang sistem informasi, bahwa kecenderungan isi sistem informasi desa bermanfaat untuk meningkatkan literasi, partisipasi, dan inovasi warga[7]. Sistem informasi desa berbentuk data spasial dan non spasial bermanfaat dalam manajemen sumber daya alam, manajemen bencana, pembangunan infrastruktur, manajemen kesehatan, dan berbagai proyek pembangunan desa[8]. *Koglam-Sangaram Village* berhasil mengembangkan model kemandirian ekonomi desa melalui *Pid-thong-lang-pha project* sistem informasi pertanian berisi informasi bibit, jumlah produksi, stok produk, dan pupuk[9]. Manfaat sistem

informasi desa *online* untuk mengakses informasi infrastruktur dan kondisi sosial desa di *Muklan Village*[10]. Namun, sistem informasi pemerintah berbasis web belum sepenuhnya mampu mewujudkan transparansi [11].

Kerangka kerja *information communication technology* (ICT) untuk pembangunan sosial ekonomi meliputi dimensi politik, bisnis, teknologi, dan sosial[12]. Tiga inti tujuan ICT, meliputi: *e-administration*, *e-service*, dan *e-participation*[13]. *E-administration* untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi publik. *E-service* untuk mewujudkan efektivitas dan transparansi layanan sektor publik. *E-participation* untuk memperkuat interaksi antara organisasi publik dan warga, serta mengkomunikasikan kebijakan publik, layanan, dan fungsinya. Penggunaan teknologi baru dan inovasi mengoptimalkan manajemen, efisiensi, transparansi, publisitas, partisipasi dan kerjasama warga serta antara sektor publik dengan masyarakat[14]. Teknologi informasi dan komunikasi sarana untuk mendekatkan hubungan negara dengan warga sehingga terwujud transparansi, akses informasi, dan partisipasi warga[14]. TIK untuk mewujudkan partisipasi dan pembelajaran warga sehingga tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan [15]. Penggunaan teknologi berhasil mewujudkan prinsip transparansi dalam *good governance* [16].

Berdasar uraian sebelumnya maka penelitian ini memfokuskan tentang kinerja sistem informasi. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana kinerja sistem informasi di Desa Semugih Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan guna perbaikan implementasi kebijakan sistem informasi bagi pemangku kepentingan baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

## LANDASAN TEORI

Pengukuran kinerja organisasi atau program dilakukan untuk mendapatkan



informasi yang valid, handal, dan objektif. Informasi dapat memperkuat manajemen dan pengambilan keputusan sehingga kinerja meningkat. Pengukuran kinerja sebagai evaluasi kinerja bagi organisasi, kota, departemen, program, dan individu[17].

Penelitian ini mendasarkan pada teori kebijakan publik. Studi kebijakan publik Dunn [18] meliputi penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian (evaluasi) kebijakan. Penilaian kebijakan untuk memantau akibat pelaksanaan kebijakan publik. Penilaian kebijakan untuk mengetahui kinerja kebijakan, selanjutnya sebagai masukan perumusan kembali masalah publik.

Kinerja (*performance*) sebagai kriteria utama untuk menilai organisasi menunjuk pada operasi, kegiatan, dan program organisasi [19]. Kinerja sebagai keberhasilan suatu tindakan, tugas atau operasi yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang, dan organisasi. Kinerja merujuk pada keluaran (*output*), hasil (*outcome*) atau pencapaian (*accomplishment*) tujuan dan sasaran organisasi. Kinerja kebijakan sebagai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan kebijakan, berupa keluaran kebijakan (*policy output*) maupun hasil kebijakan (*policy outcomes*)[20].

Pencapaian tujuan kebijakan melalui tahapan input, proses, dan *output*. *Input* kebijakan berupa sumber daya untuk menghasilkan produk dan layanan program pemerintah. Proses kebijakan adalah kegiatan untuk menghasilkan produk dan layanan publik. *Output* kebijakan yaitu keluaran kebijakan berupa produk dan layanan publik terdiri hasil awal (*initial outcomes*), hasil antara (*intermediate outcomes*), dan hasil jangka panjang (*longterm outcomes*) [20]. *Policy outcome* untuk menilai hasil suatu kebijakan. Hasil kebijakan merupakan konsekuensi lanjutan dari keluaran (*output*) kebijakan yang diterima kelompok sasaran.

Perubahan sebagai konsekuensi suatu kebijakan atau program diukur untuk mengetahui sejauhmana kinerja program atau kebijakan[20].

Praktek manajemen publik baru (*new public management*) menggunakan pengukuran kinerja lebih ketat[6]. Indikator diperlukan untuk penilaian kinerja kebijakan. Indikator sebagai alat ukur bersifat kualitatif atau kuantitatif menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan kebijakan[20]. Berdasar uraian sebelumnya maka dirumuskan indikator kinerja kebijakan sistem informasi penelitian ini, meliputi: pertama, kinerja hasil awal (*initial outcomes*), terdiri: pencapaian tujuan, kesesuaian strategis, dan nilai keunggulan sistem informasi; serta kedua, kinerja hasil antara (*intermediate outcomes*), terdiri: partisipasi dan transparansi pemerintahan dan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Pencapaian tujuan organisasi. Tujuan menunjukkan apa yang akan diwujudkan organisasi[6]. Tujuan memberikan arah terhadap apa yang akan dicapai organisasi. Berdasar Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 dijelaskan tujuan sistem informasi desa yaitu pelayanan publik, pendataan, dan jurnalisme warga. *E-governance* diarahkan pada efektivitas pencapaian tujuan, bukan sekedar efisiensi[22]. Penilaian kinerja untuk memastikan tercapainya tujuan *e-governance* yaitu masyarakat berdaya terhadap informasi sosial, ekonomi, dan politik.

Kedua, Kesesuaian (*fit*) menurut Mac Millan[6] untuk mengetahui ketepatan program yang dilaksanakan organisasi. Kesesuaian terhadap tujuan dan misi organisasi, kemampuan menggunakan keahlian (*skill*) organisasi dan sumber daya manusia, serta adanya keselarasan aktivitas dengan program. Perpaduan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi untuk memperoleh hasil lebih baik dalam



*smart governance*[23]. Melek digital berupa kemampuan termasuk media dan informasi [14]. *E-government* merupakan indikator *smart governance*[4]

Ketiga, Nilai keunggulan berupa *new-product innovation*. Inovasi merupakan perwujudan dalam menggunakan produk atau layanan baru yang berkualitas[24]. Sistem informasi dalam kerangka menuju *smart city*. Adanya inovasi mewujudkan daya saing masyarakat lokal, meningkatkan kualitas hidup warga melalui pelayanan publik, dan lingkungan lebih bersih[25]. Bentuk pemerintahan baru dan inovatif menciptakan nilai publik *smart city*[3]. Penggunaan teknologi baru mewujudkan pemerintahan partisipatif. Sistem informasi mewujudkan kualitas layanan[26].

Keempat, Partisipasi merupakan ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat pada proses pembuatan keputusan terkait kepentingan publik[18]. Partisipasi memberikan sumbangan pada pemberdayaan ketika masyarakat mendapatkan kewenangan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. UNDP menyatakan partisipasi merupakan keikutsertaan warga negara baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan[18]. Partisipasi pada *social media* merupakan bagian dari *smart governance*[4]. Masyarakat belajar dan menjadi terdidik, serta memperoleh ketrampilan (*learning process/education and gain skills*)[5]. Pelayanan publik memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat[6]. Akses terhadap sarana teknologi informasi komunikasi (ICT) menjadi penyebab kurangnya partisipasi[14].

Kelima, Transparansi yaitu keterbukaan informasi terkait kepentingan publik bagi setiap orang[18]. Keterbukaan informasi mencegah terjadinya penyelewengan. Akses informasi mendorong kontrol masyarakat. Proses pemerintahan dapat diakses warga masyarakat. Kebebasan aliran informasi dalam rangka membangun transparansi baik proses maupun kelembagaan, serta informasi mudah

diakses dan dimengerti warga[18]. UU No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa keterbukaan berkaitan dengan sikap penyelenggara negara membuka diri terhadap hak warga, informasi benar, jujur, dan tidak membedakan tentang penyelenggaraan negara[27]. Pemberian pelayanan publik bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses publik dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti[6].

Berdasar uraian sebelumnya maka kinerja sistem informasi pada penelitian ini diukur dengan indikator *policy relevance* yaitu hasil awal (*initial outcomes*) dan hasil antara (*intermediate outcomes*) sesuai Gambar 1.



Gambar 1. Alur Kinerja Sistem Informasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Semugih Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Penelitian menggunakan metode penelitian evaluasi. Informan ditentukan dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu[28]. Informan yaitu orang-orang kunci yang mengerti sistem informasi, meliputi: operator desa, pamong/perangkat kalurahan, forum pengembang sistem informasi, aparat kecamatan, dan pendamping sistem informasi.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam, dan observasi. Data terdiri dari data primer dan data sekunder berupa dokumentasi baik berupa data angka maupun peraturan. Data dikumpulkan terkait bahasan penelitian, yaitu: Pertama, hasil awal (*initial outcomes*) meliputi pencapaian tujuan, kesesuaian strategis, dan nilai keunggulan sistem informasi; Kedua, hasil antara (*intermediate outcomes*) meliputi partisipasi dan transparansi.



Analisis dilakukan terhadap data yang masuk, diinterpretasikan, dan dikategorisasikan menurut indikator atau konsep yang digunakan. Selanjutnya penulis melakukan penyimpulan sesuai pola yang ditentukan. Data dikategorisasikan pada indikator evaluasi kinerja sistem informasi yaitu: pencapaian tujuan, kesesuaian strategis, nilai keunggulan, partisipasi, dan transparansi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Semugih merupakan salah satu desa di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Semugih merupakan desa pusat Ibukota Kecamatan Rongkop. Kinerja sistem informasi pada penelitian ini meliputi 5 (lima) hal, yaitu: pencapaian tujuan (*goal attainment*), kesesuaian strategis (*strategic constituencies*), nilai keunggulan (*competing values*), partisipasi, dan transparansi.

### Pencapaian tujuan (*Goal attainment*)

Sistem informasi telah berjalan dan diupayakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk administrasi perkantoran, pemutakhiran data kemiskinan, dan meningkatkan jurnalisme warga.

Tujuan pertama sistem informasi yaitu peningkatan pelayanan publik. Sistem informasi telah mendukung pelayanan publik desa yang semakin berkualitas dalam bentuk surat keterangan pindah, keterangan pinjam ke bank, dan keterangan kependudukan. Paling tidak ada beberapa jenis layanan pemerintah desa telah difasilitasi oleh sistem informasi tersebut. Berdasar wawancara dengan pengelola Bapak Buchory menyatakan bahwa sistem informasi menghasilkan data desa yang lebih valid. Ketika warga mengajukan pelayanan lebih mudah melakukan cek data penduduk karena data berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tujuan kedua yaitu pemutakhiran (*updating*) data kemiskinan. Pencapaian tujuan

sistem informasi dilihat dari aspek keberhasilan pemutakhiran data. Verifikasi dan validasi data kemiskinan telah dilaksanakan pada bulan Nopember 2018 sampai Maret 2019. Selanjutnya data dilaporkan ke kabupaten. Data tersebut merupakan basis data terpadu kemiskinan desa sebagai dasar penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah, antara lain: bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan jamban sehat atau stop buang air bersih sembarangan. Sehingga berdasar data dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan desa. Kondisi ini menunjukkan inovasi pemerintah desa dalam penyediaan basis data sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai dasar penentuan sasaran Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Desa Semugih disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Data PBDT Desa Semugih**

No	Dusun	Jumlah	
		Jiwa	Rumah Tangga
1	Baran Kulon	96	36
2	Baran Wetan	85	29
3	Bendo Rubuh	131	46
4	Gandhu	291	104
5	Karang Wetan	175	62
6	Kemesu	122	41
7	Kemiri	159	51
8	Kerdonmiri	114	40
9	Ngrombo	127	47
10	Ploso	91	27
11	Purworejo	115	42
12	Semampir	261	87
13	Semugih	232	77
Jumlah		1.999	690

Sumber: Pemerintah Desa Semugih, 2020

PBDT tersebut untuk mengatasi *embracing error* dan *inclusion error* yang selama ini masih terjadi. Adanya PBDT akan menjamin ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.



Pencapaian tujuan ketiga yaitu terselenggaranya jurnalisme warga. Jurnalisme warga telah memberikan inspirasi dan ide baru masyarakat untuk menciptakan inovasi. Tulisan artikel dan berita bermanfaat untuk meningkatkan literasi warga. Berdasarkan pengamatan pada *Website* Semugih terdapat informasi tentang Musrenbang Desa, pengurusan akta kependudukan, BPJS, Jamkesos, IMB, HO dan sebagainya. Jurnalisme warga telah memberikan pengetahuan bagi warga. Pencapaian tujuan sistem informasi di Semugih menunjukkan bahwa efektivitas *e-governance* melalui sistem informasi sesuai pendapat Saxena[22]. Jurnalisme warga membuat akses masyarakat terhadap informasi sosial, ekonomi, dan politik agar tujuan sistem informasi tertuang sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 bisa diwujudkan.

#### **Kesesuaian strategis (Strategic Constituencies)**

Sistem informasi meliputi aspek masukan, proses, dan keluaran. Masing-masing aspek saling bergantung satu dengan lainnya. Berfungsinya satu bagian akan mempengaruhi fungsi bagian lain. Aspek sistem yang sudah dibangun mulai komponen masukan, berupa: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dana. Aspek proses meliputi penetapan regulasi, penentuan personil, dan alokasi sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sistem informasi desa.

Dasar hukum sebagai landasan sistem informasi adalah Perbup No. 32 Tahun 2018 tentang SIDA SAMEKTA. Regulasi lain adalah Keputusan Kepala Desa Nomor 05.a/KPTS/2018 tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi. Operator terdiri Bukhori Romadhoni sebagai admin, Syaebani sebagai operator, dan Wahyu Widodo sebagai jurnalis warga.

Berbagai upaya untuk mengembangkan sistem informasi telah dilakukan. Keberadaan sistem informasi untuk mewujudkan tujuan melibatkan berbagai pihak sehingga dapat meningkatkan kepuasan terhadap kinerja

implementasi. Sistem informasi Semugih sangat membantu pelayanan dan sesuai kebutuhan pada era teknologi informasi. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah kabupaten telah melakukan penguatan kapasitas pengelola berupa pelatihan untuk memberikan pemahaman tugas teknis dan administratif. Operator menjalankan tugas pengelolaan sistem informasi, yaitu menghimpun dan menginformasikan data, serta bertanggung-jawab dalam penyusunan sistem informasi kepada Kades. Pengelola dalam menjalankan tugasnya saling membantu, terutama ketika verifikasi dan validasi data kemiskinan. Untuk kelancaran pendataan dibantu dukuh yang lebih mengerti kondisi warga masyarakat di wilayahnya. Ketugasan operator merupakan tugas tambahan sedangkan tugas utamanya sebagai perangkat desa. Pengelola lebih menjalankan tugas utamanya sebagai perangkat. Hal tersebut berakibat pada belum optimalnya tercapainya tujuan sistem informasi. Produktivitas artikel masih terbatas menunjukkan belum optimalnya jurnalisme warga.

Pengelola mendapatkan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), terdiri: honor pengelola, langganan internet, dan pemeliharaan sarana prasarana. Berdasar aspek pendanaan sudah cukup memadai karena Pemdes telah menganggarkan operasional dan jaringan internet wifi *indihome* dalam APBDesa. Untuk operasional telah tersedia perangkat komputer. Berdasar data tersebut maka terdapat kesesuaian (*fit*) Mac Millan[6] yaitu ketepatan program yang dilaksanakan organisasi. Terdapat kesesuaian tujuan organisasi dengan menggunakan keahlian (*skill*) serta kemampuan sumber daya manusia dan adanya keselarasan aktivitas terhadap program. Pemerintah Desa Semugih sesuai pendapat Meijer & Bolívar[23] mengarah pada *smart governance*. Pelaku telah didorong untuk meleak media dan informasi sesuai pendapat Stringhini et al.[14] .



*Output* sistem informasi telah dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak. Keluaran kebijakan berupa pelayanan publik, pendataan/pemutakhiran data kemiskinan, dan jurnalisme warga telah sesuai Perbup No. 32 Tahun 2018. *Output* perlu terus dioptimalkan agar memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.

#### **Nilai keunggulan (*Competing values*)**

Salah satu nilai keunggulan (*competing values*) sistem informasi berkaitan dengan kelompok sasaran yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Sistem informasi merupakan sistem bersifat terbuka. Pada dasarnya siapapun bisa terlibat aktif khususnya dalam jurnalisme warga. Sistem informasi dapat digunakan oleh semua kalangan. Warga sebagai pelaku bisa menyampaikan tulisan agar dimuat dalam *web* desa. Hal ini merupakan bentuk produk atau layanan baru yang lebih berkualitas[24]

Beberapa nilai lebih *competing values* yaitu sistem informasi memunculkan inovasi dan kreativitas masyarakat. Sistem informasi mendorong warga semakin aktif dan berani menyampaikan pendapat. Sistem informasi cocok dan dibutuhkan masyarakat. Berdasar pengamatan pada *Web* desa memuat artikel Masyarakat Mencari Keadilan dengan Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Wonosari berbasis e-android tanggal 21 November 2017. Nilai lebih lainnya informasi artikel SAMSAT Desa *online* tanggal 3 April 2017. Semula informasi disampaikan pada warga menggunakan media konvensional seperti pertemuan rutin. Setelah adanya sistem informasi *online* atau jurnalisme warga maka masyarakat bisa mendapat informasi melalui media ICT. Inovasi berupa sistem informasi terbukti mampu mewujudkan kualitas layanan [26].

*Competing values* telah mendorong sistem informasi mampu bertahan sampai sekarang. Sistem informasi mudah diaplikasikan masyarakat. Bahkan sistem

informasi menjadi pekerjaan wajib dan bagian program pemerintah desa. Sistem informasi mudah dan cocok serta dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.

Nilai penting lainnya, sistem informasi mendukung Rongkop Kecamatan Iptek. *Web* desa menyambungkan potensi sosial ekonomi. Contoh artikel tanggal 23 Oktober 2017 menginformasikan “Pelatihan *Packing* Produk Makanan”. Pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2017 dilaksanakan pelatihan bersama BPTBA LIPI Gading dan BPOM. Materi pelatihan meliputi kemasan, *labelling*, *barcode*, cara pendaftaran halal, dan label halal. Operator bisa cepat menyebarluaskan kelebihan atau potensi desa. Informasi produk bisa menyebar lebih luas. Sistem ini terbukti mewujudkan daya saing lokal Semugih sesuai pendapat Appio et al.[25].

Sistem informasi menggambarkan nilai keunggulan berupa *new-product innovation*. Inovasi merupakan perwujudan dalam menggunakan produk atau layanan baru yang berkualitas[24]. Pemahaman *new product innovation* dimaknai bahwa masyarakat yang belum mengenal informasi menjadi mengenal informasi yang lebih akurat.

#### **Partisipasi**

Partisipasi merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan warga dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan manfaat hasil pembangunan. Bentuk partisipasi adalah pelibatan warga dan keterlibatan mental emosional dalam pemerintahan dan pembangunan.

Sistem informasi telah meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Warga secara partisipatif terlibat dalam pendataan keluarga miskin. Pendataan dilakukan dari, oleh, dan untuk warga miskin sesuai Perbup No. 32 Tahun 2018. Berdasar wawancara dengan Bapak Shaqri seorang dukuh menyatakan:



“Masyarakat dilibatkan dalam pendataan warga miskin. Masyarakat juga dilibatkan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dilibatkan dalam kegiatan pembangunan fisik di dusun/RT. Misalnya dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan, rehab balai dusun, pembangunan tugu, talud, drainase, dan jalan lingkungan”.

Sistem informasi menggambarkan model komunikasi melalui media dari pihak pemerintah kepada masyarakat berkaitan pelayanan publik, data kemiskinan, dan jurnalisme warga. Hal tersebut membuka ruang partisipasi warga dalam pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah menyampaikan pesan nilai kepada warga masyarakat. Terjadi interaksi dalam komunikasi. Informasi bermanfaat bagi warga sehingga warga bersedia terlibat dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Bentuk partisipasi lain melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa). Peran TKPK Desa menunjukkan perkembangan positif dan berkontribusi aktif dalam penanggulangan kemiskinan. Komunikasi partisipatoris dari, oleh, dan untuk warga miskin, TKPKDesa semakin aktif mengimplementasikan program. Komunikasi partisipatoris juga ditunjukkan kemanfaatan jurnalisme warga bagi masyarakat sehingga mereka sadar aktif terlibat dalam pembangunan berkat adanya informasi yang mudah diakses.

Pada konteks partisipasi ini, terjadi aksi kolaborasi (*collaborative action*) antar program dan antar aktor pembangunan desa yaitu pelaku sistem informasi dengan pelaku kecamatan Iptek. Hal ini membuat terbukanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat. Partisipasi di Semugih sesuai pendapat Davis [29] berupa keterlibatan mental dan emosional seseorang pada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. Partisipasi didorong melalui penyediaan data dan bahan perencanaan yang memadai, sehingga warga

berpeluang menyampaikan usulan pembangunan melalui Musrenbangdes. Usulan program didanai oleh APBDesa dan pagu indikatif wilayah kecamatan (PIWK). APBD diusulkan melalui aplikasi e-musrenbang. Sesuai pendapat Tangkilisan[24], partisipasi yaitu keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama dalam pembangunan dapat diwujudkan. ICT telah memperkuat interaksi antara pemerintah desa dengan warga, menyampaikan kebijakan publik, layanan, dan fungsinya sesuai pendapat PIWA & UNDP [13]. Teknologi sistem informasi telah membuka akses terhadap sarana partisipasi[14]. Pemanfaatan TIK mampu mewujudkan partisipasi sesuai pendapat Tomor et al.[15].

### **Transparansi**

Sistem informasi Semugih berhasil mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Terdapat kecenderungan keterbukaan dan kebebasan informasi yang didapatkan warga masyarakat serta adanya media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan telah dibangun melalui forum pertemuan dan komunikasi antara Pemdes dengan BPD serta pertemuan dusun/RT/RW. Keterbukaan telah dirasakan karena warga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi pemerintahan dan pembangunan.

Berdasar observasi bahwa satu bentuk transparansi melalui artikel pengumuman tanggal 15 Agustus 2017. Informasi lowongan perangkat Desa Semugih posisi Sekdes, Dukuh, dan staf. Melalui informasi ini, siapapun dapat mengetahui dan mempunyai kesempatan dalam rekrutmen perangkat desa. Bentuk transparansi lainnya pada pengambilan keputusan kebijakan publik. Informasi musyawarah desa dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur lembaga, perangkat, kader KB, dan tokoh masyarakat. Demikian juga transparansi terjadi pada pelantikan perangkat desa. Pelantikan perangkat diinformasikan kepada warga. Warga mengenal perangkat sehingga memudahkan warga ketika

berhubungan dengan perangkat. Dengan demikian pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi yang kuat. Transparansi layanan pendaftaran penduduk dimuat pada artikel tanggal 11 Juni 2015. Pembuatan KTP sebagai identitas resmi penduduk dan bukti diri. Syarat-syarat pembuatan KTP diinformasikan secara transparan.

Berdasar pengamatan pada Website desa <https://www.semugihRongkop.desa.id/first/artikel/189> disajikan realisasi program jamban sehat Tahun 2019 meliputi 10 (sepuluh) padukuhan dengan dana sebesar Rp.97.500.000,-. Keterbukaan informasi publik sesuai pendapat Herabudin[18] bisa diwujudkan melalui sistem informasi Semugih. Berdasarkan pengamatan, transparansi juga ditunjukkan adanya papan informasi pelaksanaan program jamban sehat/stop buang air besar sembarangan. Bentuk transparansi disajikan pada Gambar 2.



**Gambar 2. Transparansi Jamban Sehat**

Keberhasilan komunikasi dan informasi berdasar jumlah penduduk dan kelompok masyarakat yang sadar tentang informasi publik semakin meningkat. Namun demikian observasi juga menunjukkan terdapat kekurangan dalam keterbukaan informasi karena penyajian informasi belum secara lengkap menyediakan informasi yang wajib diberikan kepada publik meskipun secara prosedur administratif Pemdes sudah menyampaikan materi dokumen kepada

publik melalui BPD yang bisa diakses dengan *web* desa. Sistem informasi membuka akses warga membaca laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa melalui *web* dan papan pengumuman desa/dusun. Layanan publik desa bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses publik sesuai pendapat Mahmudi[6]. Hal tersebut mendorong perwujudan pemerintahan desa yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000. Sistem informasi telah mewujudkan tujuan ICT yaitu transparansi layanan organisasi dan sektor publik sesuai yang dikemukakan PIWA & UNDP[13]. Teknologi informasi dan komunikasi telah mendekatkan hubungan negara dengan warga sehingga terwujud transparansi yang lebih besar[14].

Berdasar pembahasan sebelumnya, kinerja kebijakan sistem informasi menggunakan analisis input, proses, dan output. Evaluasi terhadap sistem informasi Semugih berupa hasil kebijakan (*policy outcome*) terdiri kinerja hasil awal (*initial outcomes*) dan hasil antara (*intermediate outcomes*) sesuai pendapat Purwanto & Sulistyastuti[20]. Kinerja hasil sistem informasi menggambarkan pencapaian tujuan organisasi publik sesuai pendapat Keban[5]. Sistem informasi merupakan perwujudan reformasi manajemen publik baru (*new public management*) yaitu pemerintahan yang membiayai hasil (*results-oriented government*).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penilaian kinerja sistem informasi berdasarkan manajemen publik baru (*new public management*). Sistem informasi dapat mewujudkan tujuan organisasi publik. Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja sistem informasi Semugih cukup memadai. Kinerja sistem informasi ditunjukkan adanya kinerja hasil awal (*initial*



*outcomes*), yaitu: *Pertama*, Pencapaian tujuan sistem informasi meliputi: terselenggaranya pelayanan publik berupa administrasi perkantoran, tersajikannya data kemiskinan, dan terselenggaranya jurnalisme warga; *Kedua*, adanya kesesuaian strategis antara berbagai pihak terkait dalam pelayanan publik; dan *Ketiga*, adanya nilai keunggulan sistem informasi yaitu nilai inovasi positif yang dihasilkan produk sistem informasi. Selanjutnya, adanya kinerja hasil antara (*intermediate outcomes*) sistem informasi yaitu adanya peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

#### Saran

Peningkatan kinerja sistem informasi memerlukan dukungan kebijakan pemerintah kabupaten dalam bentuk pembinaan dan pemberian pedoman sistem informasi secara berkelanjutan berupa pemilahan sajian informasi yang wajib dan yang dikecualikan. Selanjutnya diperlukan integrasi sistem informasi desa dengan sistem informasi masing-masing perangkat daerah. Dinas Kominfo agar memfasilitasi jaringan internet kabel *fiber optic* sampai ke desa. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji kinerja jangka panjang sistem informasi. Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian evaluasi kinerja sistem informasi menggunakan indikator hasil jangka panjang (*long term outcomes*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Meiryani, P. Siagian, R. A. A. W. Puspokusumo, and Lusianah, "Decision Making and Management Information Systems," *J. Crit. Rev.*, vol. 7, no. 07, Apr. 2020, doi: 10.31838/jcr.07.07.52.
- [2] J. Sujata, S. Saksham, G. Tanvi, and Shreya, "Developing Smart Cities: An Integrated Framework," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 93, no. September, pp. 902–909, 2016, doi: 10.1016/j.procs.2016.07.258.
- [3] M. P. Rodríguez Bolívar, "Governance models and outcomes to foster public value creation in smart cities," *Sci. Reg.*, vol. 17, no. 1, pp. 57–80, 2018, doi: 10.14650/88817.
- [4] L. Shen, Z. Huang, S. W. Wong, S. Liao, and Y. Lou, "A Holistic Evaluation of Smart City Performance in The Context of China," *J. Clean. Prod.*, vol. 200, no. April 2021, pp. 667–679, 2018, doi: 10.1016/j.jclepro.2018.07.281.
- [5] Y. T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori dan Isu*, Ketiga, Ce. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2014.
- [6] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.
- [7] E. Nilawati, "Kecenderungan Isi Sistem Informasi Desa Kabupaten Gunungkidul (Village Information System Content Trends in Gunungkidul Regency)," *J. IPTEK-KOM J. Ilmu Pengetah. Teknol. Inf.*, vol. 21, no. 2, pp. 169–184, Dec. 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/2424>.
- [8] H. Singh, K. Krishan, and P. K. Litoria, "Creation of a Village Information System of Moga district in Punjab using Geoinformatics," in *National Conference on Recent Developments in Computing and its Applications, NCRDCA '09*, 2009, no. August, pp. 1–5, [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/publication/207038380\\_Creation\\_of\\_a\\_Village\\_Information\\_System\\_of\\_Moga\\_district\\_in\\_Punjab\\_using\\_Geoinformatics](https://www.researchgate.net/publication/207038380_Creation_of_a_Village_Information_System_of_Moga_district_in_Punjab_using_Geoinformatics).
- [9] S. Thanasripanitchai, "Daily Activities Management Information System of Koglam-Sangaram Village: The Self-Sufficiency Economy Village Model of Pid-Thong-Lang-Pha Project," *Int. J. Bus. Econ. Aff.*, vol. 2, no. 1, pp. 59–66, Feb. 2017, doi: 10.24088/ijbea-2017-21008.
- [10] Sitender, S. Kumar, and Reena, "Village Information System – A Case Study of Muklan Village, Hisar, Haryana



- (INDIA),” *Int. J. Res. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 2, pp. 184–193, 2012, [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/publication/288833492\\_Village\\_Information\\_System\\_-\\_A\\_Case\\_Study\\_of\\_Muklan\\_Village\\_Hisar\\_Haryana\\_INDIA](https://www.researchgate.net/publication/288833492_Village_Information_System_-_A_Case_Study_of_Muklan_Village_Hisar_Haryana_INDIA).
- [11] D. Hertati and Nurhadi, “Web-Based Government Information System Implementation Model For Village Government,” *Arch. Bus. Res.*, 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.14738/abr.77.6864>.
- [12] N. Roztocki, P. Soja, and H. R. Weistroffer, “The role of information and communication technologies in socioeconomic development: towards a multi-dimensional framework,” *Inf. Technol. Dev.*, vol. 25, no. 2, pp. 171–183, Apr. 2019, doi: [10.1080/02681102.2019.1596654](https://doi.org/10.1080/02681102.2019.1596654).
- [13] PIWA and UNDP, “E-governance and Citizen Participation in West Africa: Challenges and Opportunities. Case studies: Burkina Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Senegal,” *Panos Inst. West Africa United Nations Dev. Program.*, p. 102, 2011, [Online]. Available: [www.undp.org/governance%0Ahttps://www.undp.org/content/undp/en/home/librariypage/democratic-governance/access\\_to\\_informationandegovernance/e-govinWA.html](http://www.undp.org/governance%0Ahttps://www.undp.org/content/undp/en/home/librariypage/democratic-governance/access_to_informationandegovernance/e-govinWA.html).
- [14] A. Stringhini, B. Aires, P. Prosecutor, C. Autonomy, B. Aires, and A. Law, “Smart Cities: Information and Communication Technology and Citizen Participation,” vol. 8, no. 63, pp. 79–88, 2019, [Online]. Available: <http://ojs.imodev.org/index.php/RIGO/article/view/293/471>.
- [15] Z. Tomor, A. Meijer, A. Michels, and S. Geertman, “Smart Governance For Sustainable Cities: Findings from a Systematic Literature Review,” *J. Urban Technol.*, vol. 26, no. 4, pp. 3–27, Oct. 2019, doi: [10.1080/10630732.2019.1651178](https://doi.org/10.1080/10630732.2019.1651178).
- [16] H. Fikri, D. G. Suharto, and R. A. Nugroho, “The utilization of electronic government in realizing transparency and accountability of village government: Synergy of implementation of electronic village budgeting and electronic monitoring system by Banyuwangi government,” *Int. J. Multicult. Multireligious Underst.*, vol. 5, no. 4, p. 453, Aug. 2018, doi: [10.18415/ijmmu.v5i4.425](https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.425).
- [17] K. Callahan, “Elements of Effective Governance; Measurement, Accountability, and Participation. Why Measure?,” R. Jack, Ed. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007, p. 126.
- [18] Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah; Dari Implementasi ke Filosofi*, 1st ed. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2016.
- [19] S. Wibawa, *Beberapa Konsep Untuk Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- [20] E. A. Purwanto and D. R. Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, I. Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- [21] Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA) dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Gunungkidul Sejahtera (SIKAB GUMREGAH)*. Indonesia: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2018.
- [22] K. B. C. Saxena, “Towards Excellence in E-Governance,” *Int. J. Public Sect. Manag.*, vol. 18, no. 6, pp. 498–513, Oct. 2005, doi: [10.1108/09513550510616733](https://doi.org/10.1108/09513550510616733).
- [23] A. Meijer and M. P. R. Bolívar, “Governing The Smart City: A Review of The Literature on Smart Urban



- Governance,” *Int. Rev. Adm. Sci.*, vol. 82, no. 2, pp. 392–408, Jun. 2016, doi: 10.1177/0020852314564308.
- [24] H. N. S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Kedua. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- [25] F. P. Appio, M. Lima, and S. Paroutis, “Understanding Smart Cities: Innovation ecosystems, technological advancements, and societal challenges,” *Technol. Forecast. Soc. Change*, vol. 142, pp. 1–14, May 2019, doi: 10.1016/j.techfore.2018.12.018.
- [26] N. Riawati, “Village Innovation Through Village Information Administration System (SAID) in Bondowoso District East Java Province,” *Int. Semin. Ser. Reg. Dyn. Proceeding*, vol. 1, no. 1, p. September, Sep. 2019, doi: 10.19184/issrd.v1i1.13745.
- [27] LAN, *Membangun Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, 2008.
- [28] Sugiyono, *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. Ke-23. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [29] K. Davis, *Human Relation at Work, the Dynamics of Organizational Behaviour*, Thirds. USA: Mc Graw Hill Inc, 1967.
- [30] Ediwar, Jufri, Sahrul, N., Minawati, R., Irdawati, & Yurnalis. (2021). Creative Industry of the Making of Gandang Tambua Musical Instrument Based On Traditional Technology. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 3752–3764. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.05.259>